

Pelayanan permohonan penanggungan penahanan di Satreskrim Poltabes Palembang

Achmad Gusti Hartono

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=34751&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu keluhan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan di Kepolisian adalah masalah penanggungan penahanan, masyarakat tidak mengerti tentang bagaimana prosedur dalam penanggungan penahanan dan mengapa ada permohonan penanggungan yang dikabulkan dan tidak dikabulkan, atas dasar itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan pelayanan permohonan penanggungan penahanan yang penulis lakukan di Poltabes Palembang.

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mendapatkan gambaran pelayanan permohonan penanggungan penahanan di Satuan Reskrim Poltabes Palembang, termasuk mekanisme pelayanan penanggungan dan pelaksanaan pelayanannya 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelayanan permohonan penanggungan penahanan di Satuan Reskrim Poltabes Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif dan metode penelitian studi kasus yang dilaksanakan pada bulan Oktober dan November 2008 di Poltabes Palembang.

Temuan peneliti ini menyebutkan bahwa untuk diterbitkannya surat penanggungan penahanan, maka harus ada permohonan penanggungan penahanan dari masyarakat, dalam hal ini adalah tersangka, keluarga tersangka, atau pihak lain yang diminta bantuannya oleh tersangka, setelah adanya permohonan, surat permohonan diteruskan kepada Kapoltabes Palembang dengan bentuk saran dan pendapat yang berisi pertimbangan dikabulkannya atau tidak dikabulkannya permohonan melalui beberapa tingkat hirarki dalam Satuan Reskrim Poltabes Palembang, secara berturut-turut yaitu melalui penyidik yang langsung menangani perkara, Kanit Reskrim, Wakasat Reskrim, kKasat Reskrim, Wakapoltabes, sehingga kepada Kapoltabas Palembang.

Dalam pelaksanaan pelayanan penyidik mengalami kesulitan dalam menentukan besarnya uang jaminan yang patut disetorkan kepada panitera pengadilan negeri, serta dalam biaya operasional pencarian tersangka yang melarikan diri. Selain itu dalam melayani hak penanggungan penahanan atas tersangka, penyidik juga mempertimbangkan kepentingan korban yang dilayani dalam kegiatan penyidikan sebagai pihak yang telah dirugikan tersangka, sehingga pelaksanaan pelaksanaan terhadap hak penanggungan penahanan tersangka tidak dapat maksimal karena dibatasi oleh peraturan dan kepentingan korban.

Dari hasil analisa temuan penelitian, penulis menemukan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan terdiri dari faktorinter dan faktor ekstern yang masing-masing faktor dapat mendukung maupun menghambat pelaksanaan pelayanan, juga beberapa faktor yang berpengaruh atas dikabulkannya atau tidak dikabulkannya suatu permohonan penanggungan penahanan.

Setelah dilakukannya penelitian ini penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu : 1) Perlunya aturan tambahan mengenai tanggung jawab penyidik dan biaya operasional dalam hal tersangka melarikan diri. 2) Perlu adanya perubahan mekanisme yang dapat meningkatkan kecepatan pelayanan. 3) Perlunya ditambahkan kepentingan korban sebagai pertimbangan dalam pengeluaran surat perintah penahanan.